

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia memang menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat dan pengamat-pengamat akademik lainnya untuk menilai bagaimana seharusnya pembangunan yang ideal dilakukan. Pembangunan Indonesia tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang merambah ke tiap sudut bagian dunia. Banyak sekali kritik dan saran bagi pemerintah untuk membantu membenahi sistem dalam pelaksanaan pembangunan yang kebanyakan agendanya dipengaruhi oleh agenda-agenda globalisasi ini. Pembangunan Indonesia dimulai dari pembangunan daerah-daerah yang menjadi bagian dalam negara, yang diharapkan akan menimbulkan efek domino dalam perkembangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dibuat atas dasar untuk mengamati aproses pembangunan yang dimulai dari daerah, yaitu Batam, yang dapat memberikan petunjuk mengenai pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh globalisasi terhadap pergerakan pembangunan di kota berkembang, yakni kota Batam.

A. Alasan Pemilihan Judul

Banyak sektor yang menjadi penopang pembangunan Batam yang berpuluh-puluh tahun sudah dilakukan dibawah Badan Pengusahaan Batam, seperti pertambangan dan penggalian, peternakan, perikanan, jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran. Namun, yang memang paling menonjol dalam struktur ekonomi di Batam adalah dari aktifitas sektor

industri manufaktur (pengolahan). Sejak kebijakan *Free Trade Zone* yang menjadikan Batam sebagai wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, aktifitas sektor industri manufaktur (pengolahan) semakin meningkat. Dengan meningkatnya aktifitas industri, seharusnya perekonomian di Batam bisa terangkat dan kondisi sosial masyarakat Batam seharusnya mengalami perbaikan pula.

Sebagai salah satu warga Batam yang bertempat tinggal cukup lama disana dan melihat kondisi yang ada di Batam, di mana pembangunan terus terjadi di beberapa area hingga menggerus tanah-tanah hijau, sedangkan di beberapa area masih tersebar banyak sekali penduduk miskin dengan rumah tak layak menimbulkan dugaan bahwa ada yang salah dari pembangunan yang terus berlangsung di kota yang disebut-sebut sebagai kota industri ini. Itulah sebabnya judul yang disajikan dalam penelitian ini berkaitan tentang apa yang menyebabkan investasi asing melalui industri manufaktur tidak dapat secara keseluruhan menyelesaikan masalah sosial-ekonomi di kota metropolitan, Batam.

B. Latar Belakang Masalah

Investasi asing di Kepulauan Riau menjadi pemeran penting dalam pembangunan Kepulauan Riau. Investasi asing yang banyak tertanam di Batam ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan, jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Kepemilikan yang mendominasi dari bidang-bidang tersebut memang pihak-pihak asing. Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang

fabrikasi, seperti perusahaan NOV-Profab, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan minyak dan gas, pembuatan *pressure vessel*, tangki. Perusahaan-perusahaan asing tersebut menanamkan modalnya di Batam, kemudian menjadi pemeran penting dalam pergerakan perekonomian Batam pula.

Sejak tahun 1977, orientasi pengembangan Batam mulai bergeser pada sektor industri dan penunjangnya, dengan merencanakan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk menopang sector tersebut. Dari tahun 1983 hingga 1998, perencanaan pembangunan Batam dilakukan dengan konsultasi dan observasi, yang akhirnya menghasilkan prioritas dan strategi pengembangan dari masing-masing Wilayah Pengembangan di Pulau Batam, sesuai dengan *masterplan*, yaitu:

1. Area Industri Sekupang
2. Batu Ampar
3. Pantai Timur
4. Batam Centre

Pada tahap pembangunan tersebut, industri mulai berkembang, dan pengembangan industri di Kota Batam tidak terlepas dari investasi asing yang masuk dan juga berperan dalam pengembangan industri di Kota Batam.

Meskipun Batam merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, namun letaknya yang strategis yang berada dekat dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, menjadikan Batam sebagai jalur perdagangan strategis dan menarik bagi modal asing yang hendak

masuk untuk menanamkan investasinya di kota tersebut. Pembangunan yang bermula sejak tahun 1971, hingga dibentuknya sebuah kebijakan yang semakin membuat Batam menjadi incaran para investor asing, yaitu kebijakan yang menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, bersamaan dengan dua wilayah lainnya, Bintan dan Karimun, menjadikan Batam sebagai kota industri yang berkembang pesat dengan banyaknya sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi di Batam.

Sesuai dengan PP No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Batam pasal 1, wilayah Batam dan sekitarnya menjadi wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang artinya memungkinkan mobilitas investasi dan penduduk bergerak lebih cepat. Kebijakan yang disahkan pada tahun 2007, tentang pengesahan wilayah di Kepulauan Riau, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas membuat angka investasi asing di kawasan-kawasan tersebut semakin naik. Angka investasi asing yang masuk ke Batam lebih besar dibandingkan dengan investasi domestik atau investasi pemerintah. Berdasarkan data laporan perkembangan pembangunan Batam, di tahun 2013 (hingga Juni 2013), total investasi di Batam sebesar US\$ 16.135.208.773.83, dengan investasi asing memegang 43.07%, investasi domestik sebesar 36.06%, dan investasi pemerintah sebesar 20.87%.¹ Dari data tersebut, tampak bahwa investasi terbesar di Batam adalah investasi asing.

¹Batam Indonesia Free Zone Authority. (2013). *Development Progress of Batam*. Batam: Centre for Data and Information System, hlm. 22.

Dalam struktur perekonomian Batam berdasarkan *data progress* pembangunan Batam, dari tahun 2008 hingga 2011, sektor industri memegang posisi tertinggi dalam pergerakan perekonomian di Batam, terutama dalam industri manufaktur. Pada tahun 2013, 55.65% dari perekonomian Batam digerakkan oleh industri manufaktur, diikuti dengan sektor lainnya, seperti:²

- Perdagangan, hotel dan restoran (29.17%)
- Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5.96%)
- Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (1.09%)
- Pengangkutan dan Komunikasi (2.75%)
- Bangunan dan konstruksi (3.07%)
- Jasa-jasa (1.40%)
- Listrik, gas, dan air bersih (0.80%)
- Pertambangan dan penggalian (0.11%)

Dibandingkan dengan sektor-sektor lain, memang sektor industri lah yang tampak paling menggerakkan perekonomian di Batam.

Dari besarnya investasi asing melalui industri manufaktur yang berkembang di Batam, pertumbuhan ekonomi di Batam mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah harus sejalan pula dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang mencerminkan seberapa besar pengaruh meningkatnya investasi asing di wilayah tersebut,

²Batam Indonesia Free Zone Authority. (2014). *Development Progress of Batam*. Batam: Centre for Data and Information System, hlm. 44.

ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan asing terutama dalam sektor industri manufaktur.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa penanaman modal asing memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan suatu negara, dalam lingkup luasnya, atau suatu wilayah, dalam lingkup sempitnya. Peran penanaman modal asing yang penting tersebut dikarenakan oleh tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal asing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing bagi pembangunan suatu wilayah, dalam kasus ini, Batam sebagai kajiannya dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, penanaman modal asing bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Angka investasi asing yang tinggi ditunjukkan dengan jumlah perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di dalam suatu wilayah. Hal tersebut berarti perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja untuk melancarkan aktifitas produksinya. Aktifitas produksi menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mengaplikasikan tenaga dan kemampuannya dalam aktifitas produksi yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Ini berarti bahwa penanaman modal asing dapat menekan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kedua, penanaman modal asing bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka investasi asing yang tinggi, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pula. Aktifitas ekonomi semakin besar gerakannya ketika suatu wilayah ditempati oleh investasi asing, karena ada

transfer teknologi, dan juga aktifitas produksi juga besar. Ketika aktifitas ekonomi meningkat, artinya pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peran investasi asing berhasil.

Pembangunan Batam yang dimulai sejak tahun 1970-an, bermula dari kondisi Batam yang masih menjadi wilayah kosong, kemudian Batam dikembangkan untuk menjadi wilayah industri yang ramah terhadap penanaman modal asing. Terhitung sejak awal 1970-an hingga tahun 2015, hampir 40 tahun Batam melalui proses pembangunan yang membawa nama Batam menjadi kawasan industri yang cukup besar dan dikenal di kalangan investor asing.

Kedudukan Batam sebagai wilayah industri besar yang menjadi pusat ekonomi di sekitar Kepulauan Riau, membuat pertumbuhan ekonomi Batam meningkat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing seharusnya dapat terpenuhi, seperti penekanan angka pengangguran karena tersedia lapangan kerja yang memadai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangka waktu 40 tahun merupakan waktu yang terhitung cukup lama untuk mengurangi masalah-masalah kesejahteraan yang bisa saja timbul dari proses pembangunan.

Namun, selama masa 40 tahun tersebut, masalah sosial-ekonomi di Batam masih saja menggerayangi kehidupan di kota industri tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tidak

mencapai titik yang diharapkan dari penyelenggaraan penanaman modal asing yang dilakukan di Batam, yakni menyelesaikan masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak dipungkiri bahwa dengan semakin banyaknya perusahaan yang dibuka, maka lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia dan semakin besar kemungkinan angka pengangguran ditekan. Namun ternyata, masih ada tenaga kerja yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan di Batam.

Jika melihat pada kondisi yang sebenarnya di Kota Batam, akan timbul pertanyaan mengenai pengaruh perkembangan investasi asing melalui sektor industri manufaktur tersebut terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di kota Batam. Masih banyak tersebar rumah-rumah liar yang berdiri akibat kurangnya pendapatan masyarakat yang mencukupi. Jika melihat perkembangan Batam yang begitu pesat, dan Batam sering dibandingkan dengan Singapura, seharusnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Batam tidak lagi menunjukkan pemandangan yang ironis, di mana masih banyak pekerja-pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal layak, atau upah yang kecil. Masih sering pula terjadi demonstrasi penuntutan kenaikan gaji atau berhubungan dengan PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Padahal, dengan adanya kebijakan *Free Trade Zone*, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK-04/2012, dapat menjadikan Batam yang berkemajuan dengan perekonomian yang terus meningkat, dibantu oleh besarnya pergerakan investasi asing di kota tersebut. Di tahun 2015, puluhan perusahaan di Batam tutup dan

mengakibatkan 7000 lebih karyawan kehilangan pekerjaan, artinya ribuan karyawan yang di PHK menjadi pengangguran.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa pada tahun 2011, masih ada sekitar 40.493 rumah tangga miskin, atau setara dengan 6.11% dari penduduk Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri ternyata tidak serta-merta dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi di kota yang diklaim sebagai kawasan industri yang berkemajuan.

Kondisi Batam memang tidak serta-merta menunjukkan bahwa kedatangan perusahaan asing yang sangat banyak sebagai bentuk penanaman modal asing memberikan dampak yang negatif terhadap kota Batam itu sendiri. Tidak dapat luput dari perhatian bahwa datangnya perusahaan asing terutama yang bergerak di sektor industri manufaktur, telah banyak menampung tenaga kerja domestik dan membantu menurunkan tingkat pengangguran. Infrastruktur juga diperbaiki dengan maksimal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Meskipun begitu, dampak negatif dari investasi asing yang semakin meningkat tersebut dirasakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah yang berpendudukan di Batam. Tidak sedikit penduduk Batam yang masih berstatus pengangguran, rumah-rumah yang berdiri tanpa izin. Masalah-masalah tersebut ternyata tidak dapat terselesaikan secara tuntas meskipun Batam mengalami dianggap menjalani pembangunan daerah dengan baik. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sebab dari tidak sejalanannya pertumbuhan ekonomi yang baik di Batam, dengan kondisi

sosial-ekonomi masyarakat yang masih menjadi masalah yang belum teratasi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah **“Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya investasi asing bidang manufaktur dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi di Batam, Kepulauan Riau?”**

D. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian, penggunaan konsep atau teori diperlukan untuk membantu penulis merumuskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Konsep merupakan sebuah abstraksi yang mewakili suatu objek atau sifat suatu objek atau fenomena. Secara sederhana, konsep merupakan kata yang melambangkan suatu gagasan.³ Sedangkan teori merupakan gabungan dari serangkaian konsep untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan.⁴

Untuk itu, dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai kerangka berpikir untuk menjawab masalah yang diajukan pada rumusan masalah. Beberapa konsep yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

³ Masoed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hlm. 93-94

⁴ Ibid. hlm. 185

1. Konsep Penanaman Modal Asing

Pembangunan di Indonesia tidak luput dari peranan modal asing yang masuk untuk menunjang usaha peningkatan pembangunan di negara ini. Pembangunan yang dilakukan tentu memerlukan pembiayaan yang besar yang tidak hanya didapatkan dari sumber pendanaan dalam negeri saja, melainkan diperlukan pula pendanaan dari luar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peranan penanaman modal asing di Indonesia, yang berdampak pada banyak hal dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dalam UU Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2), tujuan penyelenggaraan penanaman modal disebutkan antara lain:⁵

- a) Menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional
- b) Menciptakan lapangan pekerjaan
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵ Kairupan, David, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, 2013, hlm. 3.

Penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak-pihak asing di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, yaitu:⁶

- a) Alasan-alasan politik: perusahaan-perusahaan besar memiliki pengaruh yang besar pula terhadap pemerintahannya, seperti Zaibatsu yang memiliki peran yang besar dalam politik pemerintahan Jepang. Maka, penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat dikatakan terdorong oleh pertimbangan ekonomis belaka.
- b) Pengusaha-pengusaha baru cenderung mencari peruntungan di negara-negara yang sedang berkembang, dikarenakan oleh kecilnya kemungkinan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di dalam negaranya.

Berdasarkan orientasinya, secara umum perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu:⁷

- a) *Natural-resource based* (Sumber daya alam)
- b) *Local market based* (Pasar lokal)
- c) *Export-oriented based* (Orientasi ekspor)

Negara-negara industri menghadapi permasalahan kelebihan produksi, sehingga menyebabkan kecilnya kesempatan untuk menanamkan modal didalam negeri. Maka dari itu, negara-negara industri merasa perlu untuk melakukan penanaman modal asing di negara berkembang agar produksi yang berlebih dapat tersalurkan ke luar negeri dan dapat memperluas pasarannya.

⁶ Hartono, Sunarjati, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, 1972, Bina Cipta, hlm. 132-133.

⁷ Kairupan, David, Op. Cit.

Batam, sebagai salah satu dari tiga kawasan yang dijadikan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menjadi incaran bagi investasi asing. Melihat berbagai kondisi potensial yang dimiliki Batam, meskipun Batam hanya sebuah pulau kecil diantara pulau-pulau besar di Indonesia, namun posisi strategis Batam mampu menarik investor asing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing (PMA) yang disebutkan sebelumnya dapat menjadi indikator untuk melihat apakah penanaman modal asing atau investasi asing di suatu wilayah dikatakan berhasil atau tidak. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan PMA adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya dengan adanya investasi asing, angka pengangguran dapat ditekan. Namun, di Batam sendiri, di tahun 2015 angka pengangguran mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk ke Batam belum mengatasi masalah yang dihadapi di Batam, salah satunya adalah masalah pengangguran.

Tujuan yang lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya angka investasi asing, ada harapan pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pengangguran yang rendah dan pemenuhan kebutuhan primer yang cukup. Namun, di Batam, kebutuhan papan masih sulit didapat, hingga menimbulkan banyak sekali rumah liar dan kumuh yang berdiri di atas tanah-tanah milik pengelola pembangunan Batam. Hal tersebut terjadi dipicu oleh pergerakan investasi asing yang cepat, yang membuat aktifitas ekonomi terpusat di Batam, dan penduduk

dari luar Batam pun berbondong-bondong untuk datang ke Batam, menjadikan jumlah penduduk bertambah sedangkan kapasitas pemukiman tidak memadai dan akhirnya malah menimbulkan penurunan kesejahteraan dengan tidak tersedianya tempat tinggal dan terciptanya pengangguran.

2. Teori Neoliberalisme

Arus globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek di dunia, termasuk aspek ekonomi. Hal tersebut menggiring negara-negara pada pengenalan terhadap sebuah paham yang disebut dengan “neoliberalisme”. Neoliberalisme sangat erat kaitannya dengan globalisasi. Untuk itu, sebelum memahami neoliberalisme, pemahaman terhadap globalisasi harus dilakukan terlebih dahulu.

Secara sederhana, Titus Odong Kusumajati mengatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses internasionalisasi, proses menduniakan sesuatu, atau dari sisi lain, globalisasi juga dapat dilihat sebagai proses terhapusnya batas-batas maya geografi negara.⁸Yang sering menjadi perhatian adalah globalisasi ekonomi, yakni suatu kondisi ekonomi global dengan sistem pasar bebasnya dan hak milik individu dijadikan pilar utama, serta dominasi perusahaan multinasional atau transnasional dalam pasar dunia.⁹

Mantan ekonom kepala Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, David Henderson, mendefinisikan globalisasi sebagai

⁸Saksono, I. G. (2008). *Keadilan Ekonomi dan Globalisasi*. Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas. hlm 53

⁹ Ibid. hlm. 53

pergerakan bebas barang, jasa buruh, dan modal sehingga menciptakan suatu pasar tunggal dalam hal *input* ataupun *output* dan perlakuan bersifat nasional terhadap investor asing, sehingga dari segi ekonomi, pihak asing leluasa dalam bergerak.¹⁰

Globalisasi memberikan ruang terhadap tumbuh kembangnya neoliberalisme, yang sering dipandang sebagai paham yang bersifat eksploitatif, yang mementingkan pencapaian keuntungan individu tanpa memperhatikan kepentingan publik. Neoliberalisme mengajarkan bahwa dengan menjalankan pasar bebas dan perdagangan bebas, maka kehidupan manusia dan negara akan lebih baik.¹¹

Neoliberalisme merupakan penyempurnaan dari paham ekonomi pasar liberal. Yang menjadi inti dari ekonomi pasar neoliberal adalah tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas- sempurna di pasar, pengakuan terhadap kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi, dan harga pasar ditentukan oleh negara.

Pemikiran tentang neoliberalisme digagas oleh seorang ekonom Austria bernama Friedrich August von Hayek. Hayek mengajukan keunggulan kapitalisme pasar bebas dalam bukunya, *The Road to Serfdom* (1944). Ada pula Milton Friedman, yang bersama Hayek dikenal secara luas sebagai bapak ekonom neoliberalisme. Menurut Friedman, campur tangan pemerintah dalam garis kebijakan stabilisasi dan investasi justru

¹⁰Wolf, M. (2007). *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan (Why Globalization Works)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 16

¹¹ Op. Cit. hlm 66

akan membangkrutkan masyarakat, karena kontrol atas inflasi dan pengangguran berarti kontrol pemerintah terhadap peredaran uang.¹²

Jantung dari neoliberalisme adalah gagasan mengenai cara-cara bertransaksi yang dilakukan antar pribadi manusia, baik itu tindakan atau hubungan pribadi antar manusia maupun tindakan atau hubungan legal, sosial dan politis, hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut perhitungan untung-rugi individual yang terjadi dalam transaksi ekonomi.¹³

Neoliberalisme berbeda dengan liberalisme klasik, yang digagas oleh Adam Smith, bahwa persaingan dalam pasar terbuka dilakukan oleh banyak pelaku, karena monopoli akan menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak adil dalam masyarakat dan mengurangi tingkat kesejahteraan. Untuk menciptakan kondisi persaingan pasar terbuka yang sehat, yang dibutuhkan adalah peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ketidakadilan dari warga negara lain, dan juga tugas pemerintah dalam melaksanakan pertahanan terhadap prasarana publik atau lembaga publik agar tidak hanya diperuntukkan pada pihak tertentu saja, seperti investor asing. Ini berarti dalam liberalisme klasik, pemerintah masih memiliki otoritas sebagai pengontrol ekonomi yang bersanding dengan sektor privat sebagai motor pengadaan barang dan jasa. Sedangkan, dalam neoliberalisme, pasar merupakan tolok ukur keberhasilan dan kegagalan kebijakan negara, dan negara tidak memiliki alasan untuk mencampuri dan mengawasi pasar.

¹²Wibowo, I., & Wahono, F. (2003). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. hlm. 52

¹³ Ibid. hlm. 54

Karena pasar dijadikan tolok ukur tersebut, maka kebijakan yang mengganggu kinerja pasar, dihapus atau diubah sehingga sesuai dengan prinsip pasar bebas.¹⁴

Batam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keputusan akan pengesahan Batam sebagai salah satu wilayah yang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau dikenal dengan sebutan *Free Trade Zone*, yang mana atas dasar kebijakan tersebut, artinya Batam membuka lebar pintu masuk untuk investasi asing dan juga mengikis hambatan tarif terhadap barang dan jasa yang keluar-masuk Batam dan wilayah lainnya yang dinyatakan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Implementasi kebijakan tersebut juga merupakan ciptaan pengaruh dari globalisasi, yang membawa neoliberalisme, di mana pasar bebas menancapkan benderanya di Indonesia, khususnya Batam, yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi pengembangan yang cukup baik.

Adanya neoliberalisme yang masuk ke Batam, ditandai dengan kondisi 'pasar' bebas yang diterapkan di Batam, membuat gerakan investasi asing di Batam juga sangat leluasa, sehingga angka investasi asing meningkat cepat dari tahun ke tahun. Neoliberalisme ini membuat kebijakan yang dijalankan Batam menjadi sangat ramah terhadap penanaman modal asing.

¹⁴ Ibid. hlm. 68

Penanaman modal asing yang dilakukan di Batam diharapkan dapat mencapai tujuan dilaksanakannya hal tersebut, seperti dapat ditekannya angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun, tujuan tersebut ternyata tidak tercapai dengan baik melihat angka pengangguran yang meningkat dari tahun 2013 hingga 2014, dan masih banyaknya jumlah rumah liar yang tersebar di Batam.

Otoritas pemerintah sebagai pengontrol dari investasi asing sangat diperlukan dalam mengatur proses pembangunan di Batam, tanpa mengabaikan masalah-masalah yang ada di Batam. Neoliberalisme membawa investasi asing ke Batam, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan yang terpenting mengatasi masalah sosial-ekonomi di Batam. Namun, masalah sosial-ekonomi di Batam masih melekat pada masyarakat. Globalisasi yang membawa neoliberalisme hanya dapat memberikan keuntungan, jika pemerintah dapat mengantisipasi dan melindungi masyarakatnya melalui kebijakan untuk mengawasi dan mengatur pergerakan asing, serta mengelola kebijakan agar pertumbuhan ekonomi yang meningkat sejalan dengan teratasinya masalah sosial-ekonomi yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau.

E. Hipotesa

Jawaban sementara dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa perkembangan industri manufaktur di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang merupakan salah satu dari tiga kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas, gagal menyelesaikan masalah sosial-ekonomi di Batam secara signifikan, karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan yang dijalankan dalam menghadapi neoliberalisme yang masuk ke Batam.
2. Kurang pahamnya pemerintah terhadap pengaruh neoliberalisme yang masuk melalui tumbuh kembangnya industri manufaktur yang sebagian besar merupakan perwujudan investasi asing yang ditanamkan oleh pihak asing di kota Batam.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi sebab dari tidak sejalannya pertumbuhan ekonomi baik yang sudah dialami Batam sebagai kota industri dengan iklim kondusif bagi investasi asing, dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Batam yang sebagian masih menunjukkan kondisi masyarakat kurang sejahtera.

G. Jangkauan Penelitian

Secara geografis, batasan penelitian dari skripsi ini adalah wilayah Batam, Kepulauan Riau, yang merupakan salah satu dari tiga kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, sesuai dengan kebijakan *Free Trade Zone*.

Dari segi periode penelitian, batasan dari penelitian ini adalah dari tahun 2013 hingga 2015, di mana di tahun-tahun tersebut terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap

kesejahteraan pekerja di Batam, yang menimbulkan pertanyaan akan peran investasi asing melalui industri dalam mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Batam, Kepulauan Riau.